

Pendampingan Pengurusan Dokumen Pendirian Perseroan Terbatas pada Kantor Notaris Aryanto Lie, S.H

Erni¹, Ninne Zahara Silviani²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951021.erni@uib.edu, ninne@uib.ac.id

Abstrak

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini adalah Kantor Notaris Aryanto Lie, S.H., berkedudukan di Kota Batam. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan khusus yaitu membuat akta otentik. Selain itu, notaris juga memiliki wewenang lain sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang seperti *warmenken*, legalisasi, pemberian penyuluhan hukum dan lainnya. Notaris memiliki peran yang penting dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Notaris sebagai pembuat akta pendirian perseroan terbatas yang merupakan akta otentik. Selain itu, notaris juga melakukan melakukan pengisian format isian pendirian melalui *website* Administrasi Hukum Umum (AHU) *online*, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mendapatkan surat keputusan mengenai pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendirian perseroan terbatas harus melalui beberapa prosedur dan membutuhkan dokumen-dokumen namun para pengusaha/investor yang ingin mendirikan perseroan terbatas tidak mengetahui prosedural yang harus dilaksanakan termasuk persyaratan yang harus dipenuhi. Luaran dari kegiatan PkM ini adalah akta pendirian perseroan terbatas, surat keputusan pengesahan badan hukum dan tabel persyaratan pendirian perseroan terbatas yang diharapkan dapat memudahkan para pendiri dalam mendirikan perseroan terbatas, Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tata cara dan prosedural pengurusan dokumen pendirian perseroan terbatas di Kantor Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan observasi dan wawancara.

Abstract

Partners in this Community Service (PkM) activity are the Notary Office of Aryanto Lie, S.H., domiciled in Batam City. A notary is a public official who has special authority to make an authentic deed. In addition, notaries also have other powers as regulated in laws and regulations such as *warmenken*, legalization, providing legal counseling and others. Notaries have an important role in establishing a Limited Liability Company (PT). Notary as the maker of the deed of establishment of a limited liability company which is an authentic deed. In addition, the notary also fills in the establishment form through the General Legal Administration (AHU) online website, Legal Entity Administration System (SABH) to obtain a decree regarding legalization of legal entities from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The establishment of a limited liability company must go through several procedures and require documents but entrepreneurs who want to establish a limited liability company do not know the procedures including the requirements that must be met. The outputs of this PkM activity are the deed of establishment of a limited liability company, a decree ratifying a legal entity and a table of requirements for establishing a limited liability company which is expected to facilitate the founders in establishing a limited liability company. This article aims to provide knowledge to the public regarding the procedures for managing company establishment documents.

limited in the Notary's Office. This study uses an empirical juridical method by conducting observations and interviews.

Keywords: *Deed, Notary, Establishment, Company, Limited.*

Pendahuluan

Salah satu sarana atau alat dalam melakukan praktik bisnis dalam kegiatan ekonomi adalah Perseroan Terbatas (PT) (Devi, 2019). PT memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian. PT merupakan suatu perkumpulan modal dimana minimal terdapat 2 (dua) atau lebih orang atau badan usaha selaku pemegang modal bertanggung jawab atas sejumlah modal masing-masing yang dimiliki. PT adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang mana salah satu ciri-cirinya adalah badan usaha yang terdaftar dan mempunyai prinsip pemisahan kekayaan serta pembagian kewenangan pengurus. Dengan adanya prinsip pemisahan harta kekayaan ini dapat melindungi aset PT dari kreditor pribadi pemegang saham dan sebaliknya melindungi aset pribadi milik pemegang saham dari kreditor PT (Siti, 2018). PT merupakan badan usaha yang paling diminati atau paling sering digunakan oleh pengusaha/investor untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya karena terdapat prinsip pemisahan kekayaan dan pertanggung jawaban dalam menjalankan PT. PT dapat tetap berdiri dan berjalan walaupun terdapat perubahan pengurus dan pemegang saham. Pemindahan saham dari satu orang ke orang lainnya mudah untuk dilakukan (Niru, 2018). Notaris memiliki peran yang penting dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Notaris adalah pejabat publik yang mempunyai kewenangan dalam membuat suatu akta otentik sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Selain sebagai pembuat akta otentik, notaris juga memiliki wewenang lain yaitu memberikan penyuluhan hukum yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Notaris memberikan

informasi yang berkaitan dengan proses pengurusan akta, pembuatan akta tanah dan akta risalah lelang, *warmenken*, legalisasi dan lainnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Notaris berperan sebagai pembuat akta pendirian PT yang mana merupakan akta otentik. Selain itu, Notaris melakukan pengisian format isian pendirian melalui Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) akan mendapatkan surat keputusan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Selain itu, Notaris juga berperan sebagai pemberian penyuluhan hukum kepada pendiri PT mengenai peraturan dan persyaratan dokumen yang dibutuhkan dalam mendirikan suatu PT. Notaris memberikan penjelasan mengenai prosedural dalam menyusun akta pendirian PT dan penginputan data ke dalam sistem AHU Online, SABH serta hal-hal mengenai tahapan, jangka waktu dan biaya yang diperlukan dalam melakukan pengurusan pendirian PT (Fauzan, 2020). Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai persyaratan pengurusan akta pendirian PT dan persoalan yang sering ditanyakan oleh pendiri yang akan melakukan pendirian PT, dimana dalam hal ini notaris memiliki peran untuk memberikan penyuluhan hukum. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui proses dan prosedur dalam melakukan pengurusan dokumen pendirian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para pengusaha/investor yang ingin mendirikan suatu PT mengenai PT

secara hukum, tata cara dan prosedural yang harus dilaksanakan untuk mendirikan suatu PT termasuk persyaratan yang harus dipenuhi. Para pengusaha juga tidak mengetahui perkembangan hukum mengenai PT. Oleh karena itu, pelaksana melakukan pendampingan pengurusan dokumen pendirian PT di Kantor Notaris Aryanto Lie, S.H. untuk mengetahui prosedur yang wajib dilaksanakan dalam mendirikan suatu PT.

Metode

Kegiatan PkM dilakukan di Kantor Notaris Aryanto Lie, S.H. yang terletak di Kota Batam, yang alamatnya berada di Jalan Bunga Raya, Nomor 22, Baloi Centre. Kegiatan PkM dilakukan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak 25 Februari 2022 sampai dengan 30 April 2022. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis empiris (*empirical legal research*), yang mana dilakukan dengan mengkaji unsur-unsur hukum atau konsep pola perilaku dan makna sosial, termasuk kajian pendekatan empiris (Laurensius, 2018). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dan mengamati secara langsung peristiwa yang merupakan fokus dari suatu penelitian (Thalha & Budur, 2019). Observasi pada kegiatan ini dilakukan dengan mengamati dan mendampingi dalam melakukan proses pendirian suatu PT. Pelaksana mengamati dan mengerjakan langsung cara untuk menyiapkan berkas pendirian suatu PT. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data Primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh pelaksana. Data sekunder dikumpulkan dari artikel jurnal dan situs-situs yang mendukung topik pembahasan.

Pembahasan

Proses implementasi luaran kegiatan PkM ini dilakukan dengan observasi terhadap tata cara pengurusan dokumen pendirian PT dan melaksanakan secara langsung pendampingan dalam pembuatan dokumen tersebut di Kantor Notaris Aryanto Lie, S.H. yang dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Proses kegiatan persiapan akta pendirian PT, yaitu dilakukan dengan :
 - a. Penjadwalan waktu konsultasi antara klien dan Notaris untuk mendiskusikan mengenai bentuk PT yang akan didirikan. Notaris akan memberikan penyuluhan hukum yang diperlukan mengenai PT seperti memberikan informasi mengenai syarat dalam mendirikan suatu PT, kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pendiri, dan informasi lainnya. Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain:
 - 1) Nama PT;
 - 2) Kedudukan dan alamat PT;
 - 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
 - 4) Jangka waktu PT;
 - 5) Jumlah modal dasar, modal disetor Dan modal ditempatkan dalam PT;
 - 6) Jumlah saham, nominal saham dan klasifikasi saham;
 - 7) Susunan pemegang saham dan pengurus dalam PT;
 - 8) Prosedur penetapan tempat dan prosedur dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - 9) Prosedur dalam hal mengangkat, mengganti, dan memberhentikan pengurus PT; dan
 - 10) Prosedur menggunakan laba dan membagi dividen dalam PT.
 - b. Notaris melakukan pengecekan nama PT yang akan digunakan guna mengetahui apakah nama masih tersedia dan dapat digunakan. Nama PT wajib terdiri dari minimal 3 (tiga) suku kata, berbahasa Indonesia dan

- memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengecekan dapat dilakukan oleh umum dengan mengakses *website ahu.go.id* bagian pengecekan nama PT.
- c. Setelah dokumen telah selesai disiapkan oleh notaris, Notaris akan memberikan informasi kepada klien mengenai tanggal penandatanganan akta pendirian PT.
 - d. Notaris akan menerbitkan salinan akta pendirian PT setelah penandatanganan minuta akta yang nantinya akan *diupload* ke dalam AHU Online, SABH, untuk menerbitkan surat keputusan mengenai pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI
- 2) Proses kegiatan pembelian voucher dan pemesanan nama PT melalui AHU Online, SABH setelah notaris menerbitkan Salinan akta pendirian PT, yaitu dilakukan dengan :
- a. Notaris membeli voucher Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT yaitu Voucher Persetujuan Nama Dan Pengesahan Badan Hukum PT. Pembayaran voucher dapat dilakukan notaris menggunakan aplikasi Your All Payment (YAP!). Aplikasi YAP adalah sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan *smartphone* yang dikeluarkan oleh Bank BNI (Norman, 2018). Notaris wajib menggunakan Aplikasi YAP dalam melakukan pembayaran PNBP Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
 - b. Pemesanan Nama PT Diawali dengan membuka menu daftar voucher. Selanjutnya memilih “voucher yang telah dibeli” kemudian klik “lanjutkan transaksi”. Kemudian akan muncul menu pengisian data PT dimana diminta untuk mengisi nama PT. Apabila nama tersedia dan dapat dipakai maka notaris melakukan pemesanan nama dengan mencentang pernyataan yang berada dibawah halaman dan kemudian klik “saya yakin dan lanjutkan”. Selanjutnya akan muncul pratinjau nama PT yang dipesan. Kemudian akan keluar disclaimer mengenai kewajiban notaris dalam penyampaian informasi mengenai peraturan mengenai nama PT kepada pendiri kemudian klik “lanjutkan”.
- 3) Pengisian format isian pendirian ke dalam AHU Online, SABH yang terdiri dari beberapa tahapan pengisian yaitu dilakukan dengan pengisian :
- a. Data Perseroan, yaitu mengisi nama PT, jenis PT, dan jangka waktu.
 - b. Kedudukan PT. Dalam bagian ini diisi alamat lengkap perseroan termasuk Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, nomor telepon, alamat email, dan tahun buku.
 - c. Maksud dan Tujuan PT. Dalam bagian ini diisi kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 5 digit sesuai kegiatan usaha PT.
 - d. Akta Notaris. Dalam bagian ini yang perlu diisi adalah nomor dan tanggal akta pendirian PT.
 - e. Modal Dasar. Dalam bagian ini yang perlu diisi adalah klasifikasi saham, total modal, modal dasar currency dan harga perlembar saham.
 - f. Modal disetor. Dalam bagian ini yang perlu diisi adalah klasifikasi saham, harga perlembar saham, jumlah lembar saham keseluruhan dan lembar saham.
 - g. Modal Ditempatkan Dalam bagian ini yang perlu diisi adalah modal setor dalam bentuk uang dan modal setor dalam bentuk lain.
 - h. Pengurus dan Pemegang Saham. Dalam bagian ini diisi data pengurus dan pemegang saham. Pengurus dan pemegang saham dalam PT dapat

berupa Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA). Pemegang saham dalam PT dapat berupa perorangan, badan hukum, masyarakat, Negara Republik Indonesia ataupun pemerintah.

- i. Pemilik Manfaat. Pada bagian ini diisi data pengurus dan pemegang saham yang merupakan pemilik manfaat dalam PT.
 - j. Notaris Pengganti, Bagian ini diisi apabila menggunakan notaris pengganti. Apabila tidak menggunakan notaris pengganti maka diabaikan.
 - k. Dokumen yang harus *diupload*. Pada bagian ini mencentang pernyataan dan tanggung jawab notaris dalam menyampaikan data.
 - l. *Upload* akta dan Konfirmasi permohonan. Dalam bagian ini dilakukan pratinjau pengisian data yang telah dilakukan sebelumnya dan *mengupload* Salinan akta pendirian PT ke dalam sistem AHU Online.
- 4) *Mengupload* Bukti Penyetoran Modal PT yaitu dilakukan dengan melakukan *upload* dokumen ke dalam AHU Online, SABH. Para pemegang saham wajib untuk melakukan penyetoran dengan jumlah setor sesuai dengan modal setor PT ke rekening atas nama PT yang didirikan. Waktu *upload* bukti penyetoran modal ke dalam AHU Online, SABH, adalah selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian PT. Bukti penyetoran modal dapat berupa:
- a. *Fotocopy* slip setoran;
 - b. *Fotocopy* surat keterangan bank atas nama PT;
 - c. Rekening bersama atas nama para pendiri PT
 - d. Neraca laba rugi, atau;
 - e. Surat pernyataan asli bermaterai yang berisi pernyataan bahwa pemegang saham telah menyetor modal PT yang telah ditandatangani

oleh seluruh pengurus (anggota direksi dan dewan komisaris) dan semua pendiri PT, apabila setoran dalam bentuk uang.

Setelah melakukan pendampingan terhadap pengurusan dokumen pendirian pada Kantor Notaris Aryanto Lie, S.H., pelaksana mengetahui tata cara dan prosedur pengurusan pendirian PT dari awal penyuluhan hukum kepada klien sampai dengan tahap *upload* bukti penyetoran modal. *Output* dan luaran dari kegiatan ini berhasil untuk didapatkan yaitu :

- 1) Akta pendirian PT yang penyusunannya didampingi oleh pelaksana.

Gambar 1.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas



- 2) Surat keputusan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI yang penginputan ke dalam AHU Online, SABH, didampingi pelaksana.

Gambar 2.

Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT



- 3) Tabel persyaratan pendirian PT yang diharapkan dapat membantu client yang ingin mendirikan PT.

Gambar 3.
Tabel Persyaratan Pendirian PT

No	Isi dari Pendirian PT	Keterangan
1	Nama	Minimal terdiri dari 3 suku kata, berhuruf Indonesia, tidak boleh dari singkatan/kependekan, angka atau kata.
2	Modal Dasar dan Modal Tetap	Modal tetap minimal 25% dari Modal Dasar. Bagi PMA, modal tetap minimal 10 Miliar.
3	Alamat PT	
4	Halang Tunda	Berdasarkan Kode KBLI 2020 (3 Digit)
5	Isi dari Pendirian	KTP, NPWP Aktif, Email, No HP, Paspor
6	Keterangan Tambahan	KTP, NPWP Aktif, Email, No HP, Paspor (jika ada)
7	Keterangan Tambahan	yang ada di bawah

Proses pengurusan dokumen pendirian PT di Kantor Notaris Aryanto Lie, S.H. tidak mengalami kendala.

Simpulan

Mitra dalam kegiatan PkM ini adalah Kantor Notaris Aryanto Lie, S.H., berkedudukan di Kota Batam yang alamatnya berada di Jalan Bunga Raya, Nomor 22, Balai Centre dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Notaris adalah pejabat publik yang mempunyai wewenang sebagai pembuat akta otentik sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Notaris memiliki peran yang penting dalam mendirikan Perseroan Terbatas, dimana notaris sebagai pembuat akta pendirian PT yang merupakan suatu akta otentik. Selain itu, notaris juga melakukan pengisian format isian pendirian PT ke dalam AHU Online SABH untuk mendapatkan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham RI. PkM ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi terhadap tata cara yang dilakukan untuk pendirian PT dalam kantor notaris dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan.

Luaran dari kegiatan PkM ini adalah akta pendirian PT yang mana penyusunannya didampingi oleh pelaksana dan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham RI yang penginputan ke dalam AHU Online, SABH didampingi oleh pelaksana serta tabel persyaratan pendirian PT untuk memudahkan klien kantor notaris yang ingin mendirikan suatu PT. Pelaksanaan PkM ini dilakukan dengan sukses tanpa kendala. Pelaksana berharap agar tata cara

dan prosedur pendirian PT ini dapat lebih sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami PT yang akan didirikan dan mengetahui data serta dokumen yang dibutuhkan dalam pendirian PT.

Ucapan Terimakasih

Pelaksana berterima kasih kepada semua orang yaitu orang tua, dosen, pihak mitra PkM dan rekan-rekan yang telah membantu, mendukung dan membimbing pelaksana dalam kegiatan PkM. Dengan adanya bantuan, kegiatan PkM dan artikel ini dapat terselesaikan dengan tanpa kendala.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jurnal

- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). Instrumen Pengumpulan Data. 1-20.
- Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112-132
- Atmaja, R. W. (2020). *Tanggung jawab notaris dalam pendirian perseroan terbatas* (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University).

- Pratama, J. R. H. P. (2021). Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. *SIGNIFIKAN*, 2(2), 1-18.
- Purwanti, D. A. (2021). Tinjauan Hukum Pengurusan Izin Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(2), 117-131.
- Salim, F. (2020). Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Recital Review*, 2(2), 140-156.
- Salim, Fauzan. (2020). Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Recital Review*, 2(2), 140-156.hlm. 155.
- Sari, S. F. D. N. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Lex Renaissance*, 3(2), 407-422.
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2). Hlm. 18.

Internet

Elnizar, Norman Edwin. (2018). Notaris Perlu Tahu! Bayar PNBK Kini Wajib dengan Aplikasi YAP. <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-perlu-tahu-bayar-pnbk-kini-wajib-dengan-aplikasi-yap-lt5a4c0706a8232/?page=1>, diakses pada 20 April 2022